

DOKUMEN LKJiP TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA-LITBANG) Tahun 2024. Laporan ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi dan kolaborasi dari seluruh elemen yang terlibat dalam upaya mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Buol.

Bappeda Litbang Kabupaten Buol memiliki peran stratgeis dalam menentukan arah Pembangunan daerah, menginisiasi kebijkan serta merumuskan program dan kegiatan yang mendukung fokus Pembangunan daerah. Laporan ini bertujuan untuk memberikan yang menyuluruh tentang capaian kinerja kami selama tahun 2024 mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi Pembangunan.

Pentingya akuntabilitas kinerja menjadi dasar utama penyusunan laporan ini. Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi, integritas dan akuntabilitas dalam setiap Langkah yang kami ambil demi mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Melalui laporan ini, kami berharap masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas dan lengkap mengenai pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Kami menyampaikan apresisasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, termasuk pemerintah daerah, lembaga mitra dan masyarakat.

Akhir kata, kami berharap agar laporan ini dapat menjadi alat evaluasi yang efektif untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektivitas Bappeda Litbang dalam mendukung pembangunan daerah menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

Buol, Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

Kab. Bubl

WAHYU SETYABUDHI, S.H.,M.H Pembina Utama Muda NIP. 19780313 200212 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pe	ngant	ar	i
Daftar I	si		ii
Daftar T	abel		iii
Daftar G	amba	ar	iv
BAB I	Pen	dahuluan	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Maksud dan Tujuan	2
	1.3	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA-LITBANG	3
	1.4	Sumber Daya BAPPEDA-LITBANG	14
	1.5	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
		BAPPEDA-LITBANG	15
	1.6	Dasar Hukum	18
	1.7	Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	19
BAB II	Pere	encanaan dan Perjanjian Kinerja	21
	2.1	Rencana Strategis	21
	2.2	Indikator Kinerja Utama	24
	2.3	Perjanjian Kinerja Tahunan 2024	35
	2.4	Perencanaan Anggaran Tahunan 2024	46
BAB III	Aku	ntabilitas Kinerja 2024	57
	3.1	Capaian Kinerja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol	58
	3.2	Realisasi Anggaran BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol	72
RAR IV	Pen	utun	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	14
Tabel 2.1	Tujuan Strategis BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023-2026	22
Tabel 2.2	Sasaran BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023- 2026 Untuk Mencapai Tujuan T1	22
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023	25
Tabel 2.4	Cascading Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2024	26
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2024	35
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2024	36
Tabel 2.7	Perencanaan Anggaran Tahunan 2024 dalam Melaksanakan Sasaran BAPPEDA-LITBANG	47
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	57
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	59
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol	62
Tabel 3.4	Sasaran Strategis Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023-2026 BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol	63
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024 BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol	64
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol	66
Tabel 3.7	Skala Indikator Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja	68
Tabel 3.8	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	71
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2024	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol	13
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari UU No. 32 Tahun 2004 merupakan amanah dari pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governacne) yang berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Bappeda-Litbang dituntut untuk selalu melakukan evaluasi kinerja yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol adalah sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, yang berisi hasil pencapaian indikator kinerja sasaran, yang dibandingkan dengan rencana kinerja, dianalisis dan diungkapkan faktorfaktor penyebab dan langkah-langkah perbaikan yang telah maupun yang akan dilakukan. Penyusunan LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2024 bertujuan untuk mengevaluasi dan melaporkan pencapaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi



daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan disusunnya dokumen LKjIP Bappeda Litbang Kabupaten Buol tahun 2024 diharapkan dapat:

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Litbang Kab Buol;
- 2. Mendorong Bappeda Litbang Kab Buol di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Litbang Kab Buol untuk meningkatkan kinerjanya

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Bappeda Litbang Kab Buol adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kab Buol selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP Bappeda Litbang Kab Buol juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kab Buol.

Penyusunan LKjIP Bappeda Litbang Kab Buol bertujuan untuk:

- Menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang Kab Buol tahun 2024, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil;
- 2. Menguraikan aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran daerah yang dibelanjakan pada tahun 2024 dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan); dan
- 3. Menguraikan secara singkat hubungan antara capaian pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang Kab Buol periode tahun 2023-2026 melalui realisasasi pelaksanaan Renja tahun 2024, beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 dan kaitannya dengan capaian tujuan yang hendak dicapai oleh Bappeda Litbang Kab Buol periode tahun 2023-2026, yaitu Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Peningkatan Partisipasi



Masyarakat dan Mewujudkan fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda-Litbang

1.3.1 Tugas dan Fungsi Bappeda-Litbang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) Kabupaten Buol merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) Kabupaten Buol Nomor 45 Tahun 2018 tentang tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan, Penelitian dan pengembangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Bappeda litbang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda Litbang mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- 1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten di bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
 - Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
- 2) Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
 - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
 - h. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas merumuskan dan menganalisa data penyusunan kebijakan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian badan.



- 2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:
 - a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

- Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan dan menganalisa data penyusunan kebijakan penatausahaan keuangan dan Aset badan.
- 2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;



- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep penyelenggaraan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. Pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;



- h. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. Pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- o. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- 1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi, meliputi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana
 Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang
 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



- Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
 nasional Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama keijasama antar daerah Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- 1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengumpulkan, merumuskan, menganalisa data penyusunan kebijakan tekhnis di bidang perencanaan perkonomian dan sumber daya alam.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;



- Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana
 Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang
 Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama keijasama antar daerah Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep pelaksanaan perencanaan infrastruktur kewilayahan.



- 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana
 Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang
 Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Keija Perangkat Daerah Urusan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama keijasama an tar daerah Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



g. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan, merumuskan, menganalisa data penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
 - d. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
 - e. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan Bupati Buol dan SKPD di lingkungan Pemkab Buol;
 - f. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan Bupati Buol dan SKPD di lingkungan Pemkab Buol;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistim inovasi daerah Kabupaten Buol;
 - h. Pengoordinasian pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Buol dan membentuk Forum Komunikasi Litbang Kabupaten Buol;
 - Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
 - j. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - k. Pengooridinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya,



baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta;

- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Kabupaten Buol;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



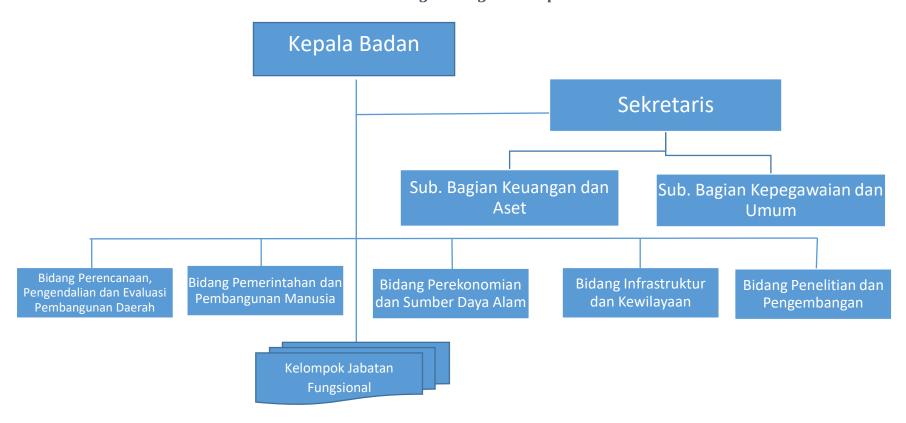
1.3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi : Peraturan Bupati Buol Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah

Gambar 2. 1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buol





1.4 Sumber Daya BAPPEDA-LITBANG

Bappeda-Litbang Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan dan penelitian pembangunan di wilayah Kabupaten Buol di tunjang oleh sumber daya yang berkualitas dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang bervariatif. Secara umum kondisi sumber daya Bappeda-Litbang Kabupaten Buol dapat dilihat dari jumlah pegawai, tugas pokok dan fungsi sumber daya manusia melalui uraian berikut:

a. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber daya manusia adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh Bappeda-Litbang Kabupaten Buol dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selaian sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol sampai dengan 31 Desember 2024 didukung oleh personil sejumlah 37 pegawwi sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Golongan IV C	1 Pegawai
2	Golongan IV b	1 Pegawai
3	Golongan IV a	8 Pegawai
4	Golongan III d	12 Pegawai
5	Golongan III c	2 Pegawai
6	Golongan III b	6 Pegawai
7	Golongan III a	2 Pegawai
8	Golongan II a	1 Pegawai



Jumlah ASN	33 Pegawai
Pegawai PPPK	2 Pegawai
Pegawai Honorer	
 Pegawai Kontrak/PTT 	19 Pegawai
Total	54 Pegawai

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Bappeda-Litbang Kab. Buol Tahun 2024

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Bappeda-Litbang Kab. Buol Tahun 2024

1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA-LITBANG

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah, dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik, dan ideologi, serta bersifat komprehensif bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka perencanaan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas, dan dapat



dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di wilayah Kabupaten Buol.

Perencanaan yang disusun tanpa didasari pada kebutuhan, kemapuan fiskal dan daya saing daerah seringkali menimbulkan permasalahan diberbagai tatanan kehidupan yang berdampak pada kerugian daerah dan masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan gesekan antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan program-program strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi sehingga kehidupan masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan tujuan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu kepekaan aparat perencana dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga pemerintah daerah merupakan bagian dari orintasi pemerintah daerah untuk menciptakan pemerintah yang baik (good governance).

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, digunakan langkah-langkah strategis terkait dengan pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan organisasi tersebut. Maka dari itu diperlukan analisis mengenai faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman).

Analisis yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara organisasi memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/meniadakan kelemahan dan ancaman yang mempengaruhi kinerja pelayanannya. Hal ini diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja, serta sebagai acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap



berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

- 1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus di akomodir;
- 2. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah;
- 3. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan, kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
- 4. Perubahan kebijakan perencanaan pembangunan melalui penerapan *money follow function* menjadi *money follow program*;
- 5. Tuntutan Masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat, akurat, dan tersedia tepat waktu; dan
- 6. Kebutuhan informasi referensi hasil-hasil penelitian.

Adapun beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

- 1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluasluasnya bagi daerah dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan;
- 2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;
- 3. Kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;



- 4. Komitmen perumusan kebijakan pembangunan daerah harus berdasarkan hasil riset;
- 5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 6. Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal.

1.6 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda-Litbang Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Dalam Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang



Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Perwujudan Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicapai;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Buol No. 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Bupati Buol Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026;
- m. Peraturan Bupati Buol Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol; dan
- n. Peraturan Bupati Buol Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



- 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 3.2 Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pencapaian indikator kinerja utama merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Guna mengukur keberhasilan tersebut, dibutuhkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kineria utama daerah sekaligus merupakan penielas menggambarkan kemajuan pembangunan Kabupaten Buol. Indikator kinerja utama juga berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pembangunan dimana publik dapat dengan mudah mengukur dan memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan kinerja pemerintah. Penetapan indikator kinerja utama juga merupakan bahan pengendalian dan evaluasi dampak kebijakan yang ditetapkan serta menjadi indikator laporan keberhasilan pembangunan dari pemerintah kepada publik.

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Buol. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

2.1.1 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pembangunan Pemerintah Daerah yang berkualitas maka perumusan tujuan strategis yang dilakukan Bappeda-Litbang Kabupaten Buol menjadi modal dasar pengganti visi dan misi 2023-2026 yang belum terlaksana dikarenakan pemilihan bupati dan wakil bupati definitif belum dilaksanakan sehinga masih mengacu pada tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda-Litbang Kabupaten Buol dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.1

Tujuan Strategis Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

T1	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat							
T2	Mewujudkan fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan							
	kebijakan pembangunan daerah							

2.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu tahun maupun waktu tahun. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang dimiliki dalam kegiatan organisasi yang bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur serta berorientasi pada hasil (Outcome) dan manfaat (Benefit) dalam kurun waktu empat tahun dan akan direalisikan pada setiap tahun. Untuk keperluan pengukuran periode 4 (empat) tahun ke depan, sasaran untuk tiap tujuan tersebut diatas dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2Sasaran Bappeda-Litbang Kabupaten Buol
Tahun 2023-2026 untuk mencapai Tujuan

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan	Tingkat	Meningkatnya	Persentase
	Kualitas	Kualitas	Kualitas	Keselarasan
	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	Program
	Pembangunan	Pembangunan	Pembangunan	Pembangunan
	Daerah Melalui	Daerah	Daerah	Dalam RKPD
	Peningkatan			Terhadap RPD
	Partisipasi			
	Masyarakat			



2 Mewujudkan Persentase Persentase Meningkatnya fungsi penelitian Pemanfaatan Pemanfaatan Implementasi Hasil Penelitian dan Hasil Penelitian Rencana pengembangan dan dan Kelitbangan dalam perumusan Pengembangan Pengembangan kebijakan yang **Implementatif** pembangunan daerah

2.1.3 Strategi

Tujuan strategis T1; dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- a. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah di setiap tingkatan yang partisipatif dan berbasis masyarakat,
- Mendorong konsistensi dan sinergitas perencanaan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat dengan meningkatkan peran seluruh stakeholders,
- Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan SKPD dan Daerah selaras dengan peraturan perundangundangan dengan prakarsa aktif stakeholders
- d. Meningkatkan pemenuhan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- e. Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
- f. Melibatkan seluruh komponen pelaku pembangunan dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Tujuan strategis T2 ; dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- Meningkatkan fungsi penelitian pengembangan dan kerjasama pembangunan sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan daerah
- b. Penguatan kerjasama untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas Litbang dengan mengadopsi model R&D di sektor swasta



- c. Penguatan kelembagaan (aturan main) untuk memfungsikan peran Litbang secara lebih optimal
- d. Optimalisasi pengelolaan data dan teknologi informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah
- e. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan publik melalui peningkatan akses dan sebaran informasi

2.2 Indikator Kinerja Utama

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif maupun kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU).

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran dokumen perencanaan strategis (Renstra). Untuk periode 2023-2026, Bappeda-Litbang Kabupaten Buol menetapkan Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut:



Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya	Persentase	Persentase Keselarasan
	Kualitas	Keselarasan	Program Pembangunan dalam
	Perencanaan	Program	RKPD terhadap RPD = Jumlah
	Pembangunan	Pembangunan	Dokumen Perencanaan
	Daerah	dalam RKPD	Pembangunan Daerah yang
		terhadap RPD	Sesuai dan Selaras / Jumlah
			Dokumen Perencanaan
			Pembangunan Daerah x 100 %
2	Meningkatnya	Persentase	Persentase Implementasi
	Pemanfaatan	Implementasi	Rencana Kelitbangan = Jumlah
	Hasil Penelitian	Rencana	Kelitbangan dalam RKPD /
	dan	Kelitbangan	Jumlah Kelitbangan dalam RPD
	Pengembangan		x 100%
	yang		
	Implementatif		



Tabel 2.4Cascading Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			ESEL(ON II				
1	2	3	4	ļ.	5	6	7	8
1.	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			ESELO		_	_	_	
1	2	3	4	T	5	6	7	8
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			ESEL	ON II				
1	2	3	4		5	6	7	8
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
							Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	ESEL		5	6	7	8
1	2	3	4		5	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	δ
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
							Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
							Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			_				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			ESELON II		_		_	
1	2	3	4		5	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS ESEL	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS ON II	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5	6	7	8
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bidang Perekonomian dan SDA



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			ESEL	ON II				
1	2	3	4	ļ	5	6	7	8
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			ESEL	ON II				
1	2	3	4	!	5	6	7	8
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur)	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
2	Mewujudkan fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bidang Penelitian dan Pengembangan
							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			ESEL					
1	2	3	4		5	6	7	8
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
							Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
							Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
							Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
							Sosialisasi dan Desiminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	



2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan 2024

Perjanjian Kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2024 merupakan sebuah tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol, hal ini disebabkan karena perjanjian kinerja tahunan merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Bappeda-Litbang Kab. Buol akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tahun 2024 alokasi belanja langsung Bappeda Litbang Kab. Buol sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan Pj. Bupati Buol sebesar Rp. **9.335.849.010,-** dengan Indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5Perjanjian Kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPD	100	%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	%



Tabel 2.6 Rencana Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Buol Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja		Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4		5	6
TOTAL PAGU ANGGARA	N BAPPEDA-LITBANO	;		,		
		PERENCANAAN		100	%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	SEKRETARIAT
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10	Dokumen	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/Bulan	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31 Unit	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	
		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	33 Unit	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja		Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4		5	6
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian dan Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian, keselarasan dan ketepatan waktu penyusunan dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	100	%	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	4	Dokumen	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik tentang program pembangunan daerah	1 Dokumen	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah	2 Dokumen	
		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan	100 %	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6 Dokumen	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilyaahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilyaahan	4 Dokumen	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Targe	t Kinerja	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4		5	6
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	Laporan	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	Laporan	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100	%	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	%	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBAGAN
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2	Laporan	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 Laporan	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 Dokumen	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	
		Pengembangan Inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan teknologi	1 Laporan	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	



2.4 Perencanan Anggaran Tahunan 2024

Untuk melaksanakan 2 sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, Bappeda-Litbang Kabupaten Buol didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:



Tabel 2.7Perencanaan Anggaran Bappeda Litbang Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4		5	6	7				
TOTAL PAGU ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG						9.335.849.010,00					
		PERENCANAAN		100	%	7.593.587.480,00					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	5.957.403.790,00	SEKRETARIAT				
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10	Dokumen	28.359.500,00					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	573.750,00					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	12.285.750,00					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	14.093.750,00					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4	Laporan	768.750,00					



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			SKPD			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	637.500,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	4.266.043.598,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/Bulan	4.177.300.668,64	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	82.094.979,36	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.647.950,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	623.833.696,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	16.375.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	36.250.000,00	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	32.452.404,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	57.442.792,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	481.313.500,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31 Unit	348.914.000,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	348.914.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	328.899.105,00	
		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.036.605,00	
		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	268.862.500,00	
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	33 Unit	361.353.891,00	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	84.729.034,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.520.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	260.104.857,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian dan Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian, keselarasan dan ketepatan waktu penyusunan dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	100 %	1.161.120.880,00	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	4 Dokumen	960.289.380,00	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	29.230.000,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	19.898.500,00	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	73.727.000,00	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	837.433.880,00	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik tentang program pembangunan daerah	1 Dokumen	7.350.000,00	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	7.350.000,00	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah	2 Dokumen	193.481.500,00	
		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	193.481.500,00	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan	100 %	475.062.810,00	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6 Dokumen	247.349.210,00	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	33.759.750,00	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	59.077.075,00	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	103.361.100,00	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	51.151.285,00	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen	97.593.950,00	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	43.639.250,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	21.895.200,00	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	32.059.500,00	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilyaahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilyaahan	4 Dokumen	130.119.650,00	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	60.918.400,00	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target	t Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4		5	6	7
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	Laporan	30.021.750,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	22.357.750,00	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	Laporan	16.821.750,00	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100	%	1.742.261.530,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	%	1.742.261.530,00	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBAGAN
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2	Laporan	20.730.500,00	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	20.190.500,00	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 Laporan	540.000,00	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 Dokumen	1.602.434.000,00	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	400.000.000,00	
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	602.434.000,00	
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	400.000.000,00	
		Pengembangan Inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan teknologi	1 Laporan	119.097.030,00	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat	1 Laporan	70.053.030,00	



Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Inovatif			
		Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	1 Laporan	49.044.000,00	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2024

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban dari Bappeda-Litbang sebagai pemegang amanah penyelenggara program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Buol untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan serta kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas dan menyajikannya di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Buol. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun memberikan gambaran tingkat pencapaian target sasaran dari masingmasing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian atas pencapaian target sasaran tersebut akan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran pencapaian kinerja Beppeda Kabupaten Buol Tahun 2024 dilakukan dengan analisis deskriptif dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai dan melakukan perbandingan juga dengan capaian pada tahun sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang. Penilaian dilakukan dengan memberikan capaian kinerja sesuai dengan skala nilai peringkat kinerja seperti dijelaskan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kinerja Penilaian Realisasi Kineja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi



No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kinerja Penilaian Realisasi Kineja
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

Bappeda-Litbang Kabupaten Buol dianggap berhasil mencapai kinerja sasaran apabila indikator kinerja keberhasilannya dapat diwujudkan lebih dari 80%. Dalam laporan ini, Bappeda-Litbang Kabupaten Buol dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026.

3.1 Capaian Kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Buol

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assesment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja kegiatan di Bappeda Litbang Kab. Buol telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaiannya.

Bappeda Litbang Kab. Buol telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan daerah tahun 2023-2026 melaksanakan 2 sasaran dengan indikator kinerja yang telah



diukur pencapaiannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang menjadi target pada Tahun 2024. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi serta capaian sasaran dalam pelaksanaan

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Meningkatnya Kualitas	Persentase Keselarasan	100%	100%	100%	
	Perencanaan	Program Pembangunan				
	Pembangunan Daerah	Dalam RKPD terhadap				
		RPD				
2.	Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100%	
	Pemanfaatan Hasil	Implementasi Rencana				
	Penelitian dan	Kelitbangan				
	Pengembangan yang					
	Implementatif					

Sumber: Data Primer Bappeda Litbang Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 untuk indikator sasaran pertama yaitu indikator persentase keselarasan program pembangunan dalam RKPD terhadap RPD target 100 % dengan realisasi 100 % dan capaian tingkat realisasi kinerja sebesar 100% yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Litbang Kab. Buol Tahun 2024 berada pada kriteria *Sangat Tinggi*. Dalam pencapaian indikator sasaran ini, jumah program yang tertuang di RKPD sebanyak 223 program dan jumlah program yang tertuang



di RPD sebanyak 220 program. Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPD mencapai 100% meskipun terdapat sedikit perbedaan jumlah program antara RPD (220 program) dan RKPD (223 program) hal ini disebabkan:

- 1. Beberapa program mengalami perubahan nama atau kategori dalam RKPD 2024 untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat atau daerah. Perubahan ini tidak mengubah substansi program tetapi memberikan penyesuaian administratif agar lebih relevan dan sesuai dengan arahan regulasi. Akibatnya, jumlah program dalam RKPD terlihat lebih banyak, meskipun esensinya sama dengan RPD;
- 2. Dalam implementasi RKPD, beberapa program dari RPD digabungkan atau dipecah menjadi beberapa sub-program untuk meningkatkan fokus pelaksanaan dan pencapaian target. Hal ini menciptakan variasi jumlah program, tetapi tetap berada dalam kerangka keselarasan RPD;
- 3. RKPD dirancang sebagai dokumen operasional tahunan yang harus fleksibel menyesuaikan dengan prioritas pembangunan yang muncul di tahun berjalan. Penyesuaian ini sering kali menghasilkan program tambahan yang masih sejalan dengan program strategis dalam RPD;
- 4. Program tambahan dalam RKPD bertujuan untuk mengakomodasi kebijakan dari RPJMD maupun kebijakan nasional yang baru. Meskipun ada tambahan, program-program tersebut tetap relevan dengan fokus yang sudah ditetapkan dalam RPD;
- 5. Dalam RKPD, beberapa program dirinci lebih lanjut untuk mendukung pelaksanaan yang lebih spesifik. Penambahan detail ini menciptakan perbedaan jumlah program tetapi tidak mengurangi keselarasan dengan dokumen perencanaan jangka menengah;
- 6. Keselarasan program RPD dan RKPD didukung oleh proses verifikasi menyeluruh yang memastikan bahwa setiap program dalam RKPD, baik yang berasal dari perubahan nomenklatur maupun program baru, tetap relevan dengan target pembangunan strategis dalam RPD.

Berdasarkan penjelasan diatas meskipun terdapat sedikit perbedaan jumlah



program antara RKPD dan RPD substansi program pembangunan tetap terjaga sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

Untuk indikator sasaran kedua yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan target 100 % dengan realisasi 100 % dan capaian tingkat realisasi kinerja sebesai 100%. Dalam pencapaian indikator sasaran yang kedua ini jumlah kelitbangan sebanyak 5 dokumen dan jumlah kelitbangan yang ditargetkan di RPD 2 dokumen, hal ini disebabkan oleh:

- 1. Realisasi 5 dokumen kelitbangan pada tahun 2024 mencerminkan upaya adaptasi pemerintah daerah terhadap kebutuhan strategis yang berkembang di lapangan. Permasalahan yang muncul, seperti dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, membutuhkan basis data dan rekomendasi berbasis penelitian yang lebih banyak dan mendalam;
- 2. Kelitbangan tambahan di luar target RPD bertujuan untuk menjawab kebutuhan prioritas yang belum teridentifikasi secara spesifik dalam dokumen rencana strategis;
- 3. Dokumen kelitbangan yang dihasilkan pada tahun 2024 memiliki peran penting dalam mendukung formulasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Peningkatan jumlah dokumen menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih terukur dan akuntabel;
- 4. Realisasi dokumen kelitbangan yang lebih banyak dari target awal dimungkinkan oleh adanya optimalisasi sumber daya manusia, anggaran, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan mitra swasta. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan pengembangan dokumen tambahan tanpa mengganggu efisiensi pelaksanaan;
- 5. Pada tahun 2024, adanya dukungan kebijakan dari tingkat nasional dan provinsi, seperti program pembangunan berkelanjutan, digitalisasi, atau mitigasi perubahan iklim, memberikan peluang untuk menghasilkan lebih banyak dokumen kelitbangan yang relevan dengan kebutuhan daerah;
- 6. Semua dokumen yang dihasilkan pada tahun 2024, baik yang sesuai



target RPD maupun tambahan, telah digunakan secara efektif dalam mendukung pengambilan kebijakan, perencanaan program, atau evaluasi kinerja. Pemanfaatan ini menjadi tolok ukur utama pencapaian indikator 100%, bukan hanya jumlah dokumen yang dihasilkan;

- 7. Pemerintah daerah menunjukkan perubahan paradigma dengan menjadikan kelitbangan sebagai instrumen strategis yang lebih adaptif dan responsif. Target awal dalam RPD dirancang minimal untuk menjaga keselarasan, sementara realisasi di lapangan menunjukkan inisiatif yang proaktif untuk melampaui target;
- 8. Pencapaian ini juga didukung oleh peningkatan kapasitas organisasi dalam menghasilkan dokumen kelitbangan. Efisiensi proses dan perbaikan manajemen waktu memungkinkan pengembangan lebih dari dua dokumen yang awalnya direncanakan.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024
Bappeda-Litbang Kabupaten Buol

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya	Persentase	100	100	100	100
	Kualitas	Keselarasan	%	%	%	%
	Perencanaan	Program				
	Pembangunan	Pembangunan				
	Daerah	Dalam RPD				
		terhadap RKPD				
2.	Meningkatnya	Persentase	100	100	100	100
	Pemanfaatan Hasil	Implementasi	%	%	%	%
	Penelitian dan	Rencana				
	Pengembangan	Kelitbangan				
	yang Implementatif					

Sumber: Data Primer Bappeda Litbang Tahun 2024



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Pada tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RPD terhadap RKPD dan Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan berhasil mencapai target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keselarasan yang tinggi antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan program pembangunan, serta efektivitas implementasi kelitbangan yang sesuai dengan rencana. Konsistensi pencapaian ini mengindikasikan keberhasilan organisasi dalam menjaga harmoni antara target dan realisasi selama dua tahun berturutturut. Namun, meskipun hasilnya ideal, diperlukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa pencapaian kuantitatif ini benar-benar merefleksikan kualitas pelaksanaan yang tinggi. Keberhasilan ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan dimensi indikator kinerja dengan menambahkan aspek kualitas atau dampak, serta mendorong inovasi lebih lanjut untuk memperkuat keberlanjutan capaian di masa mendatang.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.4Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Tahun 2023 – 2026 Bappeda-Litbang Kabupaten Buol

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
		Sasaran	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RPD terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	



2	Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100%	100%
	Pemanfaatan	Implementasi				
	Hasil Penelitian	Rencana				
	dan	Kelitbangan				
	Pengembangan					
	yang					
	Implementatif					

Sumber: Data Primer Bappeda Litbang Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat menunjukkan bahwa target indikator kinerja Bappeda-Litbang Kab. Buol untuk tahun 2023-2026. Indikator sasaran pertama yaitu persentase keselarasan program pembangunan dalam RPD terhadap RKPD target pencapaian tahun 2023-2026 sebesar 100%. Indikator sasaran kedua yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan target pencapaian tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sebesar 100%. Kedua target capaian indikator sasaran tersebut tertuang dalam Renstra Bappeda-Litbang Tahun 2023-2026.

Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Tahun 2024 Bappeda-Litbang Kabupaten Buol

No	Sasaran	Indikator	Target		Kinerja		Capaian	Kinerja
		sasaran	IKU	Target	Realisasi	%	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RPD terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	ST
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	ST



Sumber: Data Primer Bappeda Litbang Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat menunjukkan bahwa target dan capaian kinerja Bappeda-Litbang Kab. Buol tahun 2024 adalah untuk indikator sasaran pertama persentase keselarasan program pembangunan dalam RPD terhadap RKPD target 100%, realiasi kinerja mencapai 100% dengan atribut baik sekali dan indikator sasaran kedua yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan target 100 %, realisasi mencapai 100% dengan nilai atribut baik sekali.

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja dari kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja Bappeda-Litbang untuk Tahun 2024 adalah **100** % dengan kategori **Sangat Tinggi.**

Pada indikator Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RPD terhadap RKPD dan Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 berhasil mencapai target 100% sesuai yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini mencerminkan kesesuaian penuh antara dokumen perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan dengan pelaksanaan di lapangan. Keselarasan ini memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dirancang dalam RPD sepenuhnya mendukung prioritas RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional. Selain itu, implementasi rencana kelitbangan yang mencapai angka maksimal menunjukkan bahwa agenda riset dan pengembangan telah dilaksanakan secara terencana, tepat waktu, dan sesuai sasaran tanpa hambatan signifikan.

Kriteria Sangat Tinggi pada kedua indikator ini mengindikasikan bahwa capaian tidak hanya sebatas angka, tetapi juga memenuhi kriteria kualitas tinggi dalam pelaksanaan. Dalam konteks keselarasan program pembangunan, predikat ini menegaskan bahwa program-program yang dirancang telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Begitu pula pada rencana kelitbangan, implementasi yang konsisten dengan target menunjukkan bahwa inovasi berbasis riset dan pengembangan telah menghasilkan output yang relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung kebijakan pembangunan.



Capaian kinerja yang konsisten selama dua tahun berturut-turut menunjukkan adanya efektivitas dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini juga mengindikasikan pengelolaan sumber daya yang optimal, baik dari sisi anggaran, tenaga kerja, maupun waktu. Namun, meskipun capaian kuantitatif 100% dan kriteria Sangat Tinggi telah dicapai, penting untuk memastikan bahwa keberhasilan ini tidak hanya berorientasi pada administratif, tetapi juga berdampak nyata pada masyarakat. Evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan, baik dari segi efisiensi proses maupun kualitas output.

Sebagai langkah strategis ke depan, Bappeda Litbang disarankan untuk memperkuat dimensi kualitas dalam indikator kinerja. Misalnya, menambahkan pengukuran dampak langsung terhadap masyarakat atau efektivitas keluaran program pembangunan. Selain itu, inovasi dalam pelaksanaan program perlu terus didorong untuk mempertahankan predikat Baik Sekali sekaligus meningkatkan efisiensi dan cakupan manfaat. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi juga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data, sehingga capaian kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.6Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional
Bappeda-Litbang Kabupaten Buol

No	Sasaran	Indikator	Target		Kinerja		Target Nasional	
		sasaran	IKU	Target	Realisasi	%	Capaian	Atribut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100%	100%	90%	BS
	Kualitas	Keselarasan						
	Perencanaan	Program						
	Pembangunan	Pembangunan						
	Daerah	Dalam RPD						
		terhadap						
		RKPD						



2. Meningkatnya Persentase 100% 100% 100% 100% BS

Pemanfaatan Implementasi Hasil Rencana

Kelitbangan

Penelitian dan Pengembangan

yang

Implementatif

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara target dan capaian kinerja Bappeda-Litbang Kab. Buol dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2024 namun perbedaan tersebut tidak menyebabkan permasalahan yang dapat menggangu kualitas perencaaan dan pemanfaatan kelibangan di wilayah Kabupaten Buol. Adapun perbedaannya sebagai berikut untuk indikator sasaran pertama persentase keselarasan program pembangunan dalam RPD terhadap RKPD, Bappeda-Litbang Kabupaten Buol memiliki target 100% dengan realiasi kinerja mencapai 100%, sedangkan Bappenas memiliki target 90%. Indikator sasaran kedua yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan, Bappeda-Litbang memiliki target 100% dengan realisasi mencapai 100%, sedangkan target capaian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah 100%.

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja dari kedua indikator sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Buol, Bappenas dan BRIN Tahun 2024 adalah **berada pada** kategori **Sangat Tinggi.**

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada bagian ini akan menjelaskan hal-hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan terhadap capaian target indikator kinerja Bappeda-Litbang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.7Skala Indikator Keberhasilan/KegagalanIndikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Capaian	Indika	tor Keberha	asilan/Kega	galan
		Sasaran		>90 (baik sekali)	>80-90 (baik)	>60-80 (cukup)	<60 (kurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RPD terhadap RKPD	100%	V	-	-	-
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	V	-	-	-

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menujukkan bahwa pencapaian kinerja Bappeda-Litbang untuk kedua sasaran pada tahun 2024 ini rata-rata memperoleh kategori baik sekali atau dengan nilai atribut sebesar 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum dengan kategori baik sekali. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab yang kami maksudkan antara lain;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian dari semua pihak untuk terus merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Buol.
- b. Adanya Tujuan yang jelas,

Program yang berhasil biasanya memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik. Semakin jelas tujuan program, semakin mudah bagi tim untuk fokus dan mengarahkan usaha mereka menuju pencapaian tujuan tersebut.

c. Memiliki Perencanaan yang matang,

Perencanaan yang baik sangat penting, meliputi penjadwalan waktu, alokasi sumber daya yang memadai, dan identifikasi risiko serta strategi untuk mengatasinya.



d. Adanya Tim yang kompeten,

Keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada kualitas tim yang terlibat. Tim yang terdiri dari individu yang kompeten, berpengalaman, serta memiliki keterampilan yang relevan dapat meningkatkan peluang kesuksesan.

e. Komunikasi yang efektif,

Dalam sebuah organisasi diperlukan komunikasi yang baik antara semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). komunikasi yang jelas, terbuka, dan teratur antara anggota tim, manajemen, dan pihak-pihak terkait lainnya merupakan komunikasi yang sangat diharapkan dalam sebuah organiasi.

f. Monitoring dan evaluasi,

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam suatu organisasi sangatlah penting hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi keberhasilan setiap program yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain terdapatnya faktor penyebab yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- Pelaksanaan rapat evaluasi kinerja dan kegiatan setiap triwulan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, belum dilakukan secara maksimal.
- c. Masih sulitnya mengimplementasikan pengangaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Bappeda-Litbang Kab. Buol (masingmasing bagian).
- d. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di masing-masing bagian untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.



e. Alokasi anggaran yang ditetapkan pada masing-masing bagian tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian target indikator kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2024, berikut ini disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.8Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Kinerja			Anggaran		Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
					(%)			(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10= 6-9)
1.	Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100	7.593.587.480	7.195.343.419	94,76	5,24
	Kualitas	Keselarasan Program							
	Perencanaan	Pembangunan Dalam							
	Pembangunan	RPD terhadap RKPD							
	Daerah								
2.	Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100	1.742.261.530	1.734.088.811	99,53	0,47
	Pemanfaatan Hasil	Implementasi							
	Penelitian dan	Rencana Kelitbangan							
	Pengembangan yang								
	Implementatif								

Sumber : Data Primer Tahun 2024



Berdasarkan tabel di atas, menujukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Buol selama Tahun 2024 adalah di atas 95,65% dengan tetap melakukan pengendalian dan efisiensi anggaran, adapun uraian analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

- Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah, indikator sasaran persentase keselarasan program pembangunan dalam RPD terhadap RKPD yang di tindak lanjuti dengan capaian indikator kinerja 100 % dan capaian atas penyerapan anggaran sebesar 94,76% sehingga untuk indikator ini terdapat efisiensi sebesar 5,24 %.
- 2. Sasaran meningaktnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif, indikator persentase implementasi rencana kelitbangan program yang di tindak lanjuti dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sementara capaian atas penyerapan anggaran sebesar 99,53 % sehingga untuk indikator ini terdapat efisiensi sebesar 0,47 %.

3.2 Realisasi Anggaran Bappeda-Litbang Kabupaten Buol

Dari 4 program, 15 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk Bappeda-Litbang Kab. Buol sebesar Rp 9.335.849.010,00 dengan besaran realisasi sebesar Rp 8.929.432.230,00 atau 95,65 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 406.416.780,00 atau 4,35%. Meskipun pelaksanaan hampir mencapai 100% akan tetapi Bappeda-Litbang Kabupaten Buol terus mengevaluasi diri, memperbaiki sistem kerja maupun cara dan hasil pekerjaan di lapangan sehingga nanti diharapkan kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Buol dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan hasil dokumen perencanaan tersebut diimplementasikan dan berdaya guna terhadap masyarakat. Dengan demikian rata-rata pencapaian akuntabilitas keuangan ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan Bappeda-Litbang Kabupaten Buol sebagai lembaga teknis daerah sangat baik, dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 3.9

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 Per 31 Desember 2024

							Targ	get dan Reali:	sasi Program / Kegiata	n Tahun 2024		
Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja		Real	isasi Kinerja	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5)	8	9	10 = (9/8)	11
TOTAL PAGU ANGGA	ARAN BAPPEDA-LI	ГBANG				-		·	9.335.849.010,00	8.929.432.230	<u>95.65%</u>	
		PERENCANAAN		100	%	100	%	100%	7.593.587.480,00	7.195.343.419,00	94,76%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	%	100%	5.957.403.790,00	5.809.144.157,00	97,51%	SEKRETARIAT
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10	Dokumen	10	Dokumen	100%	28.359.500,00	28.095.000,00	99,07%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	8	Dokumen	100%	573.750,00	570.000,00	99,35%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	12.285.750,00	12.174.000,00	99,09%	



							Targ	get dan Realis	sasi Program / Kegiata	n Tahun 2024		
Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	N		Real	lisasi Kinerja	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/8)	11
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	14.093.750,00	13.996.000,00	99,31%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100%	768.750,00	725.000,00	94,31%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	4	Laporan	100%	637.500,00	630.000,00	98,82%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Laporan	12	Laporan	100%	4.266.043.598,00	4.196.642.567,00	98,37%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	504	Orang/Bulan	504	Orang/Bulan	100%	4.177.300.668,64	4.123.063.067,00	98,70%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	82.094.979,36	67.739.500,00	82,51%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100%	6.647.950,00	5.840.000,00	87,85%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Laporan	12	Laporan	100%	623.833.696,00	576.020.154,00	92,34%	



					Tarş	get dan Reali:	sasi Program / Kegiata	n Tahun 2024		
Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/8)	11
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	16.375.000,00	15.583.500,00	95,17%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	36.250.000,00	36.200.000,00	99,86%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	32.452.404,00	31.874.750,00	98,22%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	57.442.792,00	57.375.000,00	99,88%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	481.313.500,00	434.986.904,00	90,37%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31 Unit	31 Unit	100%	348.914.000,00	344.339.000,00	98,69%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	31 Unit	100%	348.914.000,00	344.339.000,00	98,69%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	328.899.105,00	318.744.209,00	96,91%	
		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	60.036.605,00	56.702.122,00	94,45%	



							Targ	get dan Reali:	sasi Program / Kegiata	n Tahun 2024		
Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja		Reali	sasi Kinerja	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/8)	11
		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100%	268.862.500,00	262.042.087,00	97,46%	
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	33	Unit	33	Unit	100%	361.353.891,00	345.303.227,00	95,56%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	11	Unit	100%	84.729.034,00	81.724.212,00	96,45%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	12	Unit	100%	8.520.000,00	8.462.500,00	99,33%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100%	260.104.857,00	247.116.515,00	95,01%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	10	Unit	100%	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	



							Targ	get dan Reali	sasi Program / Kegiata	n Tahun 2024		
Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	(OUTCOME)/ KEGIATAN OUTPUT) / SUB KEGIATAN		Rea	alisasi Kinerja	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/8)	11
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian dan Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian, keselarasan dan ketepatan waktu penyusunan dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	100	100 %		%	100%	1.161.120.880,00	963.656.102,00	82,99%	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	960.289.380,00	772.685.852,00	80,46%	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara	3	Berita Acara	100%	29.230.000,00	26.828.000,00	91,78%	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100%	19.898.500,00	18.911.500,00	95,04%	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	2	Berita Acara	100%	73.727.000,00	71.586.000,00	97,10%	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	837.433.880,00	655.360.352,00	78,26%	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik tentang program pembangunan daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00%	



							Targ	get dan Reali:	sasi Program / Kegiata	n Tahun 2024		
Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT))/ KEGIATAN SUB KEGIATAN		Reali	sasi Kinerja	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/8)	11
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100	Orang	100	Orang	100%	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00%	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	193.481.500,00	183.620.250,00	94,90%	
		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan	2	Laporan	100%	193.481.500,00	183.620.250,00	94,90%	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan	100	%	100	%	100%	475.062.810,00	422.543.160,00	88,94%	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	247.349.210,00	226.955.260,00	91,75%	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	33.759.750,00	33.475.735,00	99,16%	



					Tarş	get dan Reali	sasi Program / Kegiata	ın Tahun 2024		
Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/8)	11
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	59.077.075,00	57.444.750,00	97,24%	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	100%	103.361.100,00	102.710.000,00	99,37%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100%	51.151.285,00	33.324.775,00	65,15%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	97.593.950,00	81.651.000,00	83,66%	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	43.639.250,00	41.106.200,00	94,20%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100%	21.895.200,00	20.915.000,00	95,52%	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	32.059.500,00	19.629.800,00	61,23%	



							Targ	get dan Reali	sasi Program / Kegiata	n Tahun 2024		
Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja		Reali	sasi Kinerja	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/8)	11
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilyaahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilyaahan	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	130.119.650,00	113.936.900,00	87,56%	
		Koordinasi Penyusunan Dokuman Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	60.918.400,00	50.665.500,00	83,17%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	Laporan	1	Laporan	100%	30.021.750,00	29.406.000,00	97,95%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	1	Laporan	100%	22.357.750,00	17.129.700,00	76,62%	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	Laporan	1	Laporan	100%	16.821.750,00	16.735.700,00	99,49%	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100	%	100	%	100%	1.742.261.530,00	1.734.088.811,00	99,53%	



						Targ	get dan Reali	sasi Program / Kegiata	n Tahun 2024		
Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RERINTAHAN (OUTCOME)/ KEGIATAN PROGRAM / (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		Target Kinerja		Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/8)	11
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %		100 %	100%	1.742.261.530,00	1.734.088.811,00	99,53%	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBAGAN
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Lapora	ın	2 Laporan	100%	20.730.500,00	20.681.250,00	99,76%	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Lapora	ın	1 Laporan	100%	20.190.500,00	20.141.250,00	99,76%	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 Lapora	ın	1 Laporan	100%	540.000,00	540.000,00	100,00%	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 Dokume	en	5 Dokumen	100%	1.602.434.000,00	1.594.970.277,00	99,53%	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokume	en	1 Dokumen	100%	400.000.000,00	397.313.677,00	99,33%	
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokume	en	1 Dokumen	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	



				Target dan Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2024												
Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Unit Kerja Penanggung Jawab						
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/8)	11						
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	602.434.000,00	602.430.000,00	100,00%							
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	400.000.000,00	395.226.600,00	98,81%							
		Pengembangan Inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan teknologi	1 Laporan	1 Laporan	100%	119.097.030,00	118.437.284,00	99,45%							
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	100%	70.053.030,00	69.534.284,00	99,26%							
		Sosialisasi dan Desiminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	49.044.000,00	48.903.000,00	99,71%							

Sumber: Data Primer Tahun 2024



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) Bappeda-Litbang Kabupaten Buol kepada pemerintah daerah untuk Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Bappeda Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2024 ini menggambarkan kinerja Bappeda-Litbang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran serta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Tahun 2024 Bappeda-Litbang menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator, dengan kriteria nilai sangat tinggi dan Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan kriteria nilai sangat tinggi.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tahun 2024 alokasi anggaran untuk Bappeda-Litbang Kab. Buol sebesar Rp 9.335.849.010,00 dengan besaran realisasi sebesar Rp 8.929.432.230,00 atau 95,65 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 406.416.780,00 atau 4,35%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol pada tahun 2024 mempunyai beberapa kendala yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat realsasi kegiatan dan anggaran. Namun adanya hambatan tersebut secara keseluruhan pencapaian kinerja yang dapat



menunjang Fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dapat dilaksanakan secara baik oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol.

Untuk tetap dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja perangka daerah, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan, diantaranya:

- a. Perlu dilakukan peningkatan kapabilitas ASN dengan binbingan teknis dan pelatihan teknis maupun umum.
- Evaluasi intensif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat mengantisipasi hambatan dan masalah dalam pelaksanaannya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2024 diharapkan dapat menjadikan perbaikan dan proyeksi ditahun selanjutnya dan besar harapan capaian kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Buol mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan fokus Kabupaten Buol sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Buol, Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab.

Buo

WAHYU SETYABUDNI, S.H.,M. Pembina Utama Muda

NIP. 19780313 200212 1 004